

ANALISIS PERAN SEKTOR KEMARITIMAN DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN *BLUE ECONOMY* NASIONAL DI INDONESIA

Qayla Latifah Hariady Majid¹, Mashita Dwi Tidore²

^{1,2} Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2024
Revised November 2024
Accepted November 2024
Available online Oktober 2024

Korespondensi: Email :

¹qaylalatifah88@gmail.com

²mashitatidore@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Abstract

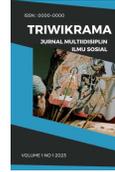
Indonesia has prioritized the notion of a “blue economy” as a key element of its development strategy. With its productive waters and significant shipping capabilities, Indonesia is uniquely positioned between the Pacific and Indian Oceans, flanked by Asia and Australia. This article examines the blue economy paradigm, which has gained significance as healthy seas generate employment possibilities and food sources, promote economic development, manage climate, and improve the welfare of coastal communities. The blue economy idea offers practical and comprehensive techniques for the management of marine and coastal resources within the context of sustainable development. This article employs a combination of descriptive techniques and literature

review methods. The findings reveal that 1) the concept of a “blue economy,” emphasizing the sustainable utilization of marine and oceanic resources, has emerged as a significant framework for fostering economic growth, and 2) Indonesia's aspiration to harness its marine resource wealth in pursuit of a national blue economy will be largely influenced by its maritime orientation.

Keywords: *Blue economy, maritime, Indonesia*

Abstrak

Indonesia telah menjadikan gagasan “ekonomi biru” sebagai komponen penting dalam pandangan pembangunannya. Indonesia memiliki perairan yang sangat produktif dengan kapasitas alami yang tinggi untuk pelayaran karena dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta berada di antara benua Asia dan Australia. Penelitian ini berfokus pada konsep ekonomi biru akhir-akhir ini menjadi isu penting karena lautan yang sehat menyediakan lapangan kerja dan pangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, mengatur iklim dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep ekonomi biru mengenai sumber daya kelautan dan pesisir dipandang sebagai aset vital yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang jika dikelola secara bijak. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep ekonomi biru menawarkan solusi berkelanjutan dan komprehensif dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggabungkan teknik deskriptif dengan metode studi literatur. Hasil yang didapat yaitu 1) Gagasan “ekonomi biru”, yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya laut dan samudera secara berkelanjutan, telah muncul sebagai paradigma penting dalam kemajuan pertumbuhan



ekonomi, 2) Keinginan Indonesia untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya laut ke arah gagasan ekonomi biru nasional akan secara signifikan dibentuk oleh poros maritim.

Kata kunci: Ekonomi biru, maritim, Indonesia

1. LATAR BELAKANG

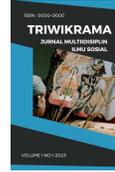
Indonesia adalah negara yang berada di tepi laut. Indonesia memiliki luas laut yang diperkirakan mencapai 5,8 juta km². Meskipun demikian, hanya lebih dari 59% dari seluruh potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang telah dimanfaatkan (Kurnia, 2018). Indonesia adalah negara ketiga di dunia dengan garis pantai terpanjang, menurut data statistik BPS. Kelimpahan ini memiliki potensi besar yang menunggu untuk digali. Dalam hal tersebut kekayaan perikanan dan kelautan merupakan suatu sumber daya alam hayati dan non-hayati yang bisa dimanfaatkan dalam sektor membangkitkan ekonomi Indonesia (Ghalidza, 2020).

Blue economy atau ekonomi biru didefinisikan sebagai industri yang memanfaatkan sumber daya laut, memanfaatkan sumber daya laut ini sesuai dengan letak geografis suatu negara (Smith-Godfrey, 2016). Pada dasarnya memanfaatkan sumber daya laut harus sesuai dengan sumber daya hayati suatu negara yaitu kekayaan perikanan dan kelautan. Industri yang memanfaatkan sumber daya laut ini merupakan langkah bijak dalam mendorong ekonomi nasional Indonesia. Namun, keadaan untuk memanfaatkan ekonomi biru sering menjadi permasalahan lingkungan dalam beberapa waktu belakangan ini.

Permasalahan iklim dan lingkungan hidup adalah salah satu problematika internasional yang paling signifikan dan rumit yang kini dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Sumber daya alam akan menjadi lebih langka karena populasi yang padat, dan teknologi akan digunakan untuk menjarah alam tanpa terkendali, sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Berbagai guncangan alam telah terjadi, termasuk ketidakseimbangan ekologi, penipisan lapisan ozon, dan erosi, yang semuanya menempatkan keberadaan lingkungan dalam bahaya. Maka untuk pemanfaatan potensi sumber daya laut Indonesia yang kaya, harus ada langkah yang bijak untuk menghindari kualitas lingkungan yang terus menurun.

Penulis berargumen bahwa harus ada solusi yang cerdas untuk hal ini diperlukan untuk mengawasi dan memanfaatkan setiap sumber daya yang ada di lautan Indonesia untuk memastikan pertumbuhan yang tepat dan, tentu saja, berkelanjutan di masa depan. Laut adalah sumber daya utama yang diprioritaskan dalam evolusi ini. Saat ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kurang memperhatikan sumber daya lautnya, termasuk masyarakat pesisir. Pemukiman pesisir menunjukkan tingkat harapan hidup yang rendah, yang merupakan indikasi dari hal ini. Selain itu, kota-kota pesisir yang memiliki lingkungan yang penuh dengan potensi yang belum dimanfaatkan, masih hidup dalam kemiskinan dan memiliki akses yang rendah terhadap layanan pemerintah, termasuk pendidikan, dari sudut pandang sosio-ekonomi (Prayuda & Sary, 2019).

Secara global, terutama bagi dengan wilayah pesisir dan laut yang luas, upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan harus memprioritaskan lautan dan sumber daya kelautan. Hal ini berlaku di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan pantai yang panjang. Mengingat isu-isu yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan meningkatnya permintaan akan sumber daya laut, gagasan tentang



“ekonomi biru” menjadi semakin penting. Dalam upaya untuk menjaga lingkungan laut, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya laut, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, gagasan ini dikembangkan. Indonesia telah mengintegrasikan konsep ekonomi biru ke dalam strateginya, mengingat statusnya sebagai negara maritim dan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa (Alifa & Zahidi, 2024).

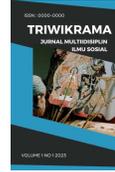
Indonesia telah menjadikan gagasan “ekonomi biru” sebagai komponen penting dalam pandangan pembangunannya. Indonesia memiliki perairan yang sangat produktif dengan kapasitas alami yang tinggi untuk pelayaran karena dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta berada di antara benua Asia dan Australia. Letaknya yang berada di daerah tropis, yang menyebabkan fluktuasi suhu udara yang sangat kecil, juga mendorong pertumbuhan berbagai spesies biota laut. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dalam hal ini, Indonesia memiliki beban berat untuk menjaga dan mengelola sumber daya lautnya secara bijaksana untuk mewujudkan gagasan keanekaragaman hayati laut penggunaan sumber daya laut secara bijaksana lingkungan laut dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan (Adnan et al., 2023).

Potensi maritim Indonesia merupakan faktor krusial dalam kemakmuran sosial dan ekonomi negara serta berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional (Zulkifli et al., 2023). Sumber daya maritim Indonesia, yang terdiri dari ikan, minyak, dan gas alam, menawarkan prospek yang melimpah untuk kemajuan sektor perikanan dan energi. Indonesia juga memiliki banyak pantai dan pulau yang menakjubkan yang dapat menjadi pusat dari berbagai aktivitas olahraga air. Semua hal dipertimbangkan, topografi kepulauan Indonesia jelas menghadirkan banyak peluang untuk ekspansi ekonomi dan pengembangan sektor kelautan.

Lautan Indonesia kaya dari segi sumber daya non-biotik hingga abiotik maupun keanekaragaman hayati (biotik). Oleh karena itu, gagasan “ekonomi biru” sangat penting untuk melestarikan keuntungan finansial tanpa membahayakan lingkungan. Ekonomi biru adalah sebuah gagasan atau ide yang menawarkan pendekatan baru dengan tujuan mendorong konservasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi di industri kelautan dan akuatik dengan tetap melestarikan sumber daya dan menjaga lingkungan industri akuatik. Strategi ini akan memungkinkan kita untuk menjaga lingkungan dan sumber daya laut, yang sangat penting bagi masa depan Indonesia, sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gagasan ekonomi telah diciptakan sebagai reaksi terhadap kesulitan yang ditimbulkan oleh ekonomi dunia yang sering mengeksploitasi manusia dan merusak lingkungan. Sebuah paradigma ekonomi baru yang mempromosikan penerapan pembangunan berkelanjutan dengan mengacu pada gagasan ekosistem alam diperlukan dalam menghadapi masalah ini. Argumen bahwa sistem ekonomi global yang ada saat ini sering mengeksploitasi manusia dan merusak lingkungan membutuhkan penekanan yang lebih kuat pada gagasan ini.

Lantas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran sektor maritim di Indonesia dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan *Blue economy*. Tidak hanya itu analisis berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan dan relevan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.



2. METODE PENELITIAN

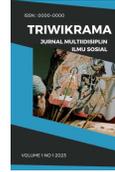
Dalam menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti, penelitian ini menggabungkan teknik deskriptif dengan metode studi literatur. menjelaskan dan melakukan karakterisasi fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian studi literatur merinci informasi dari beberapa sumber literatur untuk mendapatkan data yang bermakna dan relevan. Buku-buku, makalah, catatan, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal yang telah melalui prosedur tinjauan literatur merupakan data yang dikumpulkan dari pendekatan penelitian studi literatur ini. Publikasi dari organisasi nasional dan internasional serta badan-badan pemerintah termasuk dalam pengumpulan data ini. Berkenaan dengan investigasi ini, metodologi studi literatur merupakan hal yang tepat dalam mengumpulkan data serta memecahkan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Blue economy* Indonesia di Wilayah Pesisir

Blue economy didefinisikan oleh *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD) sebagai industri yang memanfaatkan sumber daya laut. Ekonomi biru didefinisikan sebagai sektor ekonomi yang menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini memungkinkan sumber daya digunakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan sekaligus melindungi lingkungan maritim. Gagasan di balik “ekonomi biru” adalah mengembangkan sektor yang ramah lingkungan untuk mengelola sumber daya laut dengan cara yang ramah lingkungan sektor yang ramah lingkungan untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemetaan sektor prioritas digunakan untuk menilai posisi Indonesia dalam pengembangan ekonomi biru dengan cara menganalisis sektor tersebut dan membuat skala prioritas berdasarkan garis waktu pencapaian hingga tahun sektor tersebut dan memprioritaskannya berdasarkan garis waktu pencapaian hingga tahun 2045. Penentuan sektor-sektor utama ekonomi biru didasarkan pada tiga variabel utama ekonomi biru, yang mencakup potensi dan *output* ekonomi setiap sektor, jumlah uang yang dibutuhkan setiap sektor untuk merealisasikan potensinya, dan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap (Rahman et al., 2024).

Ekonomi biru untuk mewujudkan kerja sama antar anggota APEC yang mendefinisikan ekonomi biru sebagai model ekonomi yang mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang menekankan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Pembangunan kelautan yang kurang optimal dan cenderung tidak berkelanjutan disebabkan oleh pola pembangunan yang kurang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), menerapkan sistem rantai pasok yang tidak terintegrasi, kurang inklusif. Pada hal pembangunan yang kurang merujuk pada IPTEK, pemerintah seharusnya melakukan upaya dengan menggunakan ahli-ahli dalam bidang teknologi untuk percepatan pengelolaan laut untuk mendukung *blue economy*. Melalui percepatan ahli-ahli di

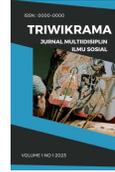


bidang teknologi diharapkan dalam membentuk pemanfaatan sumber daya alam melalui sistem teknologi yang terbaru. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan model ekonomi biru sehingga lingkungan tetap terjaga. Komitmen APEC adalah pembangunan berkelanjutan dan perlindungan sumber daya laut dan kelautan, pengelolaan laut untuk ketahanan pangan, mendorong perdagangan bebas dan terbuka, memerangi penangkapan dan perdagangan ikan secara ilegal dan meningkatkan pengelolaan perikanan, meningkatkan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dan meningkatkan perdagangan terbuka dan bebas untuk produk perikanan dan kelautan.

Adapun ekonomi biru Indonesia juga sejalan dengan ASEAN *Blue economy* Agenda. Promosi konsep ekonomi biru secara global bertujuan untuk mendukung penggunaan sumber daya laut dan perairan pedalaman secara berkelanjutan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan (ASEAN, 2023). Agenda Ekonomi Biru ASEAN bertujuan untuk memanfaatkan potensi laut dan samudra yang melimpah di kawasan Asia Tenggara untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sembari meningkatkan kesadaran akan ancaman yang mereka hadapi, seperti polusi plastik di perairan, gagasan ini menyoroti pentingnya mengembangkan dan melindungi samudra, laut, ekosistem laut dan pesisir, serta sumber daya air tawar pedalaman (ASEAN, 2023). Pendekatan sumber daya ke laut diadopsi di kawasan ASEAN yang beragam untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi, dengan mengakui keterkaitan antara perairan dan sistem. Konsep ekonomi biru mengakui bahwa ekosistem air tawar dan laut yang sehat memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi berbasis laut dan air tawar, serta berupaya memastikan bahwa negara-negara pesisir, kepulauan, dan negara yang terkurung daratan dapat memperoleh manfaat dari sumber daya ini (ASEAN, 2023). Menurut ASEAN, strategi ini membutuhkan pendekatan terpadu, komprehensif, dan partisipatif yang mempertimbangkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya ekonomi biru yang bersifat ramah lingkungan.

Memang benar bahwa wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Dengan potensi sumber daya alam laut yang dimiliki, seharusnya wilayah ini dapat berkembang dan meningkatkan kualitas hidup mereka yang tinggal di sekitar pantai. Namun, kenyataannya, kemiskinan merupakan ciri umum kehidupan masyarakat pesisir, dan penduduknya selalu dilanda kesulitan. Tingkat kemakmuran masyarakat yang hidup di kawasan pesisir saat ini masih berada di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor agrikultur, khususnya pertanian (Anwar & Wahyuni, 2019). Mengingat keadaan ini, tekanan jangka panjang terhadap sumber daya pesisir diperkirakan akan menghasilkan kesejahteraan yang relatif buruk dan status ekonomi yang rendah. Permukiman pesisir juga kurang tertata dan menimbulkan kesan kumuh.

Seiring dengan pertumbuhan Indonesia yang bergerak dan mengalir ke seluruh wilayah, Indonesia juga dihadapkan dengan kondisi global seperti pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang berupaya untuk mendorong stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN. Isu-isu yang perlu diatasi adalah (1) tingginya angka kemiskinan di wilayah pesisir dan (2) meluasnya praktik eksploitasi yang merusak sumber daya pesisir. (3) Degradasi norma dan nilai dari budaya setempat. 4)



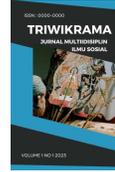
Kurangnya kemandirian dan akuntabilitas di antara kelompok-kelompok sosial di wilayah pesisir; dan (5) Ketiadaan infrastruktur, termasuk unit-unit kesehatan, di masyarakat pesisir (Ramadhanty et al., 2020). Infrastruktur dan fasilitas kesehatan di kota-kota dan lingkungan yang miskin. Cara untuk menanggapi hambatan-hambatan ini adalah dengan melakukan eksekusi, penting untuk menyoroti peran yang dimainkan oleh pendekatan ekonomi biru dalam memperkuat masyarakat pesisir. Masyarakat diajarkan cara mengurangi risiko eksploitasi berlebihan, yang selama ini menjadi perhatian, dan cara mengelola sumber daya alam secara efisien karena penangkapan ikan dan makhluk laut lainnya secara berlebihan akan terjadi jika ikan dan makhluk laut lainnya ditangkap secara berlebihan.

Penerapan sistem tangkap-bagi berdasarkan kuota dapat membantu mengatur populasi ikan dan memastikan keberlanjutan, tetapi sejumlah kendala menghalangi realisasi ekonomi biru Indonesia secara penuh, termasuk penangkapan ikan yang berlebihan dan penipisan sumber daya, yang membahayakan keanekaragaman hayati laut dan keberlangsungan ekonomi jangka panjang (Setyawati et al., 2020). Selain itu, infrastruktur yang buruk dapat menghalangi masyarakat pesisir untuk mengakses pasar dan menghambat investasi di industri maritim, di mana infrastruktur pelabuhan, jaringan transportasi, dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan daya kompetitif atau daya saing (Habibie et al., 2024). Program-program yang memberdayakan masyarakat pesisir melalui pendidikan dan pengelolaan sumber daya juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif, dan pemerintah harus memprioritaskan pelibatan masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan manfaat dari inisiatif ekonomi biru (Alfiandri et al., 2024).

Ketika pemerintah menyadari hal-hal tersebut, pemerintah akan lebih cenderung untuk secara agresif mendukung pemberdayaan lingkungan tepi laut. Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan budaya bahari, mewujudkan keindahan dan kemakmuran kawasan perairan laut Indonesia, serta menggunakan kearifan lokal terkait sumber daya kelautan-yang secara teori memiliki keunggulan komparatif-keterkaitan antara peran yang dimainkan oleh masyarakat pesisir dan pemerintah sangat dinantikan dan diperlukan keuntungan komparatif. Pemberdayaan masyarakat di sektor kelautan tidak diragukan lagi dapat berkontribusi pada keberhasilan MEA dan menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial global, karena hal ini melibatkan lebih dari sekadar menjadi pelanggan-ini juga melibatkan ekspor (Dhani Akbar et al., 2022).

B. Peran Sektor Kemaritiman

Salah satu negara kepulauan, atau dengan kata lain, pulau-pulau yang memiliki potensi dan keunggulan di bidang kelautan dan maritim karena kargo yang membawa produk untuk kebutuhan pangan, jalur laut pada dasarnya bertanggung jawab atas 80% perdagangan global. yaitu negara Indonesia, berkenaan dengan hal tersebut poros maritim di bidang kelautan Indonesia sangat berimplikasi kepada negara-negara lainnya dikarenakan membawa tanggung jawab 80% atas perdagangan global. Sementara itu, jalur perairan di Indonesia menjadi penghalang bagi lebih dari 60% ekspor komoditas dan kebutuhan pokok melalui laut. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus



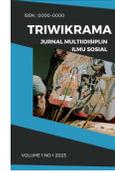
memanfaatkan potensi ini sebaik-baiknya untuk memajukan kepentingan bangsa dalam pengembangan konsep geopolitik dan geostrategis. Poros Maritim akan memainkan peran penting dalam membentuk kemauan Indonesia untuk mengeksplorasi sumber daya alam laut yang melimpah. Faktor ini akan menjadi kunci yang memicu Indonesia untuk menghadapi era MEA.

Wilayah pesisir merupakan salah satu poros maritim dunia, Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah pulau yang banyak juga tidak dapat semua wilayah pesisir menjadi wilayah sektor untuk mendorong *blue economy* melalui hal tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut objek penelitian untuk wilayah tidak memiliki karakteristik tertentu, dikarenakan hampir seluruh pulau dapat memiliki akses-akses tertentu yang menjadi poros maritim dunia dengan potensi-potensi sumber daya perairannya. Ide yang mudah dipahami secara umum adalah bahwa letak strategis yang Indonesia miliki sebagai rute penjualan bahari laut dapat digunakan sebagai salah satu aspek untuk mengangkat derajat negara di mata internasional di masa depan, dan harus internasional di masa depan, dan seharusnya Indonesia memiliki potensi untuk memainkan memainkan peran bidak politiknya di kancah politik internasional (Ramadhanty et al., 2020)

Gagasan yang dikenal sebagai “poros maritim dunia” menyoroti fakta bahwa industri maritim adalah fokus prioritas negara Indonesia. Indonesia memiliki potensi strategis jika dimanfaatkan dan dicapai dengan optimal. Supaya hal tersebut bisa terwujud, sejumlah agenda pembangunan berpusat pada lima pilar utama, yaitu sebagai berikut: (1) Restorasi atau revitalisasi budaya maritim yang telah dibangun oleh nenek moyang bangsa Indonesia. (2) Melestarikan sumber daya alam hayati dan non-hayati di perairan dan laut. (3) Mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan pangan laut yang berkedaulatan. (4) Mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan infrastruktur kelautan. Infrastruktur perlu dibangun, dan (5) menghubungkan kelautan Indonesia akses ke sumber daya laut nasional. Memang, Indonesia sudah memiliki semua syarat dan ketentuan yang dibutuhkan sebagai fondasi awal untuk pembangunan di aspek poros maritim.

Perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, perkapalan dan perdagangan maritim merupakan beberapa aspek utama ekonomi maritim Indonesia. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir ikan terbesar di dunia, dengan ekspor perikanan mencapai 1,22 juta ton senilai lebih dari 6 miliar dolar AS pada tahun 2022. Sektor perikanan merupakan komponen kunci dari ekonomi biru Indonesia, yang berkontribusi secara signifikan terhadap PDB nasional dan menghidupi jutaan masyarakat. Pada tahun 2023, perikanan menyumbang sekitar 2,81% dari PDB, yang mencerminkan tren peningkatan produksi dan ekspor ikan (Pratiwi, 2023).

Berdasarkan penelitian (Apriliana et al., 2024), menunjukkan bahwa jumlah produksi perikanan tangkap dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah nelayan. Dengan demikian, jumlah kapal penangkap ikan secara signifikan mempengaruhi jumlah produksi perikanan tangkap, tetapi jumlah nelayan tidak memiliki dampak yang nyata tentang penilaian hasil perikanan tangkap. Pada perikanan tangkap, jumlah moda atau kapal penangkap ikan berperan secara signifikan terhadap jumlah produksi perikanan tangkap, namun jumlah kapal penangkap ikan tidak berpengaruh nyata terhadap nilai produksi perikanan tangkap. Nilai *output* perikanan tangkap tidak dipengaruhi secara



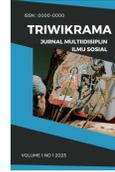
signifikan oleh jumlah kapal perikanan tangkap maupun volume produksi perikanan tangkap. Nilai hasil perikanan tangkap, nilai produksi perikanan tangkap, dan nilai produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Nilai produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh secara be terhadap PDRB, dan jumlah kemiskinan di masyarakat tidak dipengaruhi oleh nilai besar produksi perikanan tangkap terhadap tingkat kemiskinan di masyarakat.

Memanfaatkan garis pantai Indonesia yang menakjubkan dan keanekaragaman hayati laut yang melimpah, pariwisata bahari merupakan sektor penting lain dari ekonomi biru negara yang tidak hanya menciptakan pendapatan, tetapi juga mendukung inisiatif konservasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ekosistem laut. Adapun inisiatif untuk memanfaatkan energi laut dapat mendiversifikasi portofolio energi Indonesia, sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan pengembangan sumber energi terbarukan dari sumber daya laut yang menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Anggraini & Santoso, 2023). Selain itu, perekonomian Indonesia juga sangat bergantung pada perdagangan dan pelayaran oleh karena banyaknya rute maritim, dan peningkatan infrastruktur pelabuhan serta efisiensi pelayaran dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan daya saing perdagangan (Bintari et al., 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

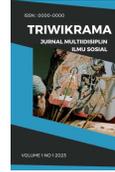
Gagasan "*Blue economy*", yang mengutamakan penggunaan sumber daya laut dan samudera dengan sistem yang berkelanjutan, telah muncul sebagai konsep penting dalam kemajuan pertumbuhan ekonomi internasional menjadi paradigma yang signifikan bagi kemajuan ekonomi dunia. Sumber daya laut dan kelautan menjadi semakin signifikan dalam konteks kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk mewujudkan gagasan ekonomi biru. Mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan Di antara hambatan utama untuk mewujudkan gagasan ini adalah pengelolaan sumber daya laut yang menggunakan sistem berkelanjutan atau ramah lingkungan, pengamatan cermat atas lingkungan laut, dan perundingan keputusan untuk hal-hal yang berkaitan dengan laut yang bijaksana. Elemen penting yang telah muncul sebagai sarana untuk mencapai realisasi konsep ekonomi biru adalah fungsi sektor maritim.

Dalam memajukan kepentingan negara dalam penciptaan konsepsi geopolitik dan geostrategis, pemerintah Indonesia harus memanfaatkan sepenuhnya kemungkinan ini. Keinginan Indonesia untuk mengeksplorasi kekayaan sumber daya laut ke arah gagasan ekonomi biru nasional akan secara signifikan dibentuk oleh poros maritim.



DAFTAR REFERENSI

- Adnan, A. D. I., Hasana, S., & Assidiq, F. M. (2023). IMPLEMENTASI KONSEP *BLUE ECONOMY* DI INDONESIA DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI BIG DATA. *SENSISTEK*, 6(2).
- Alfiandri, A., Malik, J. A., & Adiarto, A. (2024). Innovative governance of *blue economy* in coastal community Empowerment Bintan Regency. *BIO Web of Conferences*, 134, 03008. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202413403008>
- Alifa, N. N., & Zahidi, M. S. (2024). PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU SEBAGAI STRATEGI INDONESIA MENUJU EKONOMI MAJU. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 38(1), 48–65. <https://doi.org/10.52318/jisip.2023.v38.1.4>
- Anggraini, T. S., & Santoso, C. (2023). DEVELOPMENT OF OCEAN RENEWABLE ENERGY MODEL IN INDONESIA TO SUPPORT ECO-FRIENDLY ENERGY. *the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences/International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLVIII-M-3–2023, 1–5. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-xxviii-m-3-2023-1-2023>
- Anwar, Z., & Wahyuni, W. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(1). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/10622/7138>
- Apriliana, T., Fathonah, A. N., & Ali, M. (2024). *Blue economy* dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Indonesia. *Journal Of Economics and Business*, 8(1).
- ASEAN. (2023, September 5). ASEAN *Blue economy* Framework. <https://asean.org/asean-blue-economy-framework/>
- Bintari, P. N., Nawawi, C. I., & Kurniasari, D. E. (2023). Kajian Potensi Ekspor dan Impor Melalui Jalur Pelayaran untuk Mendukung Diversifikasi Perekonomian Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6). <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7254#>
- Dhani Akbar, Ryan Anggria Pratama, Yudhyo, Riama Lisnawati Sianturi, & Nadya Triyana. (2022). Strategi Pengembangan *Blue economy* Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 166–177. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.8>
- Ghalidza, N. M. B. (2020). KONSEP *BLUE ECONOMY* TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 22(1).
- Kurnia, I. (2018). Aspek Nasional Dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. http://lib.unika.ac.id/?p=show_detail&id=48553899
- Habibie, M., Masfar, F. H., Sidabutar, Y. F., & Amelia, C. (2024). Opportunities and Challenges for Utilizing the Social Potential of Infrastructure toward A *Blue economy*. *Sharia Economics*, 7(1). <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i1.4260>
- Pratiwi, F. S. (2023, April 6). Nilai Ekspor Perikanan Indonesia Capai US\$6,24 Miliar pada 2022. Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant. <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/nilai-ekspor-perikanan-indonesia-capai-us624-miliar-pada-2022>
- Prayuda, R., & Sary, D. V. S. (2019). STRATEGI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP *BLUE ECONOMY* TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2).



-
- Rahman, A., Prakoso, L. Y., & Suwito, S. (2024). STRATEGI EKONOMI PERTAHANAN MARITIM DENGAN PENERAPAN *BLUE ECONOMY*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(4).
- Ramadhanty, N. R., Sumantri, S. H., Suwarno, P., & Supriyadi. (2020). ANALISIS KANDUNGAN MIKROPLASTIK PADA EKOSISTEMPESISIR DAN PRODUK GARAM DI PROVINSI SULAWESI BARATDALAM MENDUKUNG *BLUE ECONOMY* KEAMANAN MARITIM. *Jurnal Education and Development*, 8(4).
- Retnosari, L. (2023, November 2). Indonesia heading toward the *blue economy*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/11/02/indonesia-heading-toward-the-blue-economy.html>
- Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the *blue economy*. *Maritime Affairs Journal of the National Maritime Foundation of India*, 12(1), 58–64. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>
- Setyawati, L. R., Tian, H., Cahya, D. D., Marsetio, Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2020). IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI BIRU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR DI KOTA SABANG. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(4). <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3115>
- Zulkifli, N., Nurjannah, I., Usman, N., & Mokodompit, E. A. (2023). Implikasi Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Maritim. Centre for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nps2v>